



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: DL
ASISTEN III	: [Signature]
KABAN	: [Signature]

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Peraturan kepala daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan/SKPD adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau ditempat lain termasuk catering dan jasa boga.

- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 280.000,- per hari.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak restoran dilakukan dengan memberikan formulir pendataan orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau melakukan kegiatan yang sejenis dengan itu yang belum dipungut pajak restoran selaku subjek pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya, subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran kegiatannya kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menjadi wajib pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Bidang Pendapatan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. foto copy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

- c. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa; dan
 - d. foto copy PBB 5 tahun terakhir.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
- a. kartu NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak;
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu

SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango atau dapat diakses melalui website resmi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah meja, jumlah kursi, jumlah tamu per hari dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak atau pelaporan jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa terutangnya pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk dan format isian formulir SPTPD tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua

SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masih dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak restoran kurang dibayar; atau
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 8

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 9

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran beroperasi atau tempat pelaksanaan kegiatan berlangsung.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender sejak terjadinya pelayanan di restoran yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

BAB VII

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak restoran dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan; dan
 - b. sistem wajib pungut (WAPU).
- (2) sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;

- b. wajib pajak membayar sendiri pajak restoran berdasarkan SPTPD;
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan; dan
 - d. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan *bill* (nota) pajak restoran dan/atau sejenisnya yang ter-*porporasi* oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. dilakukan oleh Bendahara SKPD/Bendahara Desa untuk kegiatan yang memuat mata anggaran makan minum tamu, makan minum rapat atau mata anggaran sejenis yang dianggarkan dalam APBN/APBD, termasuk didalamnya yang dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 - c. dilakukan kepada rekanan/kontraktor/pihak ketiga yang mendapatkan pekerjaan pengadaan barang jasa (makan minum) di Kabupaten Bone Bolango, baik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBN;
 - d. setiap rekanan/kontraktor/pihak ketiga yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak restoran dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menyampaikan SPTPD;
 3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak restoran berdasarkan SPTPD; dan
 4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan;

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 14

- (1) Pajak restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank melalui PT. Bank SulutGo Cabang Suwawa, Kas Penerimaan Kabupaten Bone Bolango atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, dalam jangka waktu 1 x 24 jam, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan disertai alasan

yang jelas dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian hutang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima oleh Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa

- angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah pajak yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pemberian pengurangan pajak setinggi-tingginya sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 1. foto copy KTP;
 2. foto copy SKPD; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan surat keputusan pengurangan

- pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB IX

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. foto copy KTP;
 2. foto copy STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan

3. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menyampaikan laporan kepada Bupati Bone Bolango terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.

- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango mengurangkan atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak

dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copy :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Bupati Bone Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango atas usul Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak restoran, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan pajak restoran tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu pekerjaan pengadaan barang jasa oleh Rekanan, Bupati Bone Bolango berdasarkan permohonan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat menunjuk Inspektorat atau Instansi lainnya yang bersesuaian untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif pemungutan pajak untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan

- d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
 - (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak restoran.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak restoran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak restoran yang tidak seharusnya terutang;
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak restoran kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. foto copy SPTPD dan SKPDLB;
 3. bukti pembayaran yang sah; dan
 4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;

- b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango harus memberikan keputusan.
 - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (8) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak restoran.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak restoran dilakukan dengan menerbitkan

Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak restoran.

- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga atau mata anggaran lainnya yang bersesuaian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: DL
ASISTEN III	: 
KABAN	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 19 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Prof. DR. BJ. Habibie, M.Eng No 1
Kecamatan Suwawa

No Formulir :

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK PRIBADI / BADAN

Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango
di -
Suwawa

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan huruf cetak
2. Beri tanda V pada kotak isian yang tersedia.
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi harap disampaikan kembali kepada :
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango.

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat :
Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
No Telp :
3. Surat Izin yang Dimiliki (fotocopy izin harap dilampirkan)
- Izin Gangguan : No _____ tgl _____
- IMB : No _____ tgl _____

- : No tgl
- : No tgl

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

- Biro Reklame
- Pengambilan Mineral BLB
- Parkir
- Hiburan
- Hotel
- Restoran
- Lainnya,

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik / Pengelola :

6. Pekerjaan :

7. Alamat :

Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
No Telp :

8. Kewajiban Pajak / Retribusi

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pajak Hotel | <input type="checkbox"/> Retribusi Kebersihan |
| <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan | <input type="checkbox"/> Retribusi Pasar |
| <input type="checkbox"/> Pajak Reklame | <input type="checkbox"/> Retribusi Parkir |
| <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan | <input type="checkbox"/> Lainnya, |
| <input type="checkbox"/> Pajak Mineral BLB | |
| <input type="checkbox"/> Pajak Restoran | |
| <input type="checkbox"/> PBB-P2 | |

	Nama Jelas : Tanda Tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama / NIP :	
Tanda Tangan :	Nama / NIP :
	Tanda Tangan :
Nomor Formulir :	
TANDA TERIMA	
Nama :	
Alamat :	
, 2017
	Yang menerima

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: DL
ASISTEN III	: 
KABAN	: 

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 19 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Prof. DR. BJ. Habibie, M.Eng No 1
Kecamatan Suwawa

No SPTPD :

Masa Pajak : s/d
Thn Pajak :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK RESTORAN

Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango
di -
Suwawa

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan huruf cetak
2. Beri tanda V pada kotak isian yang tersedia.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada :
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

4. Data Objek Pajak :

No	Jumlah Meja	Jumlah Kursi	Jumlah Tamu / Hari

5. Menggunakan Kas Register : Ya / Tidak
6. Mengadakan pembukuan / pencatatan : Ya / Tidak
7. Jumlah Pembayaran dan Pajak terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu)

a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl

.....

b. Dasar Pengenaan : Rp.

c. Tarif Pajak (sesuai PERDA) : 10 %

d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

8. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan *Bill*)

a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl

.....

b. Dasar Pengenaan : Rp.

c. Tarif Pajak (sesuai PERDA) : 10 %

d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

....., 2017

Wajib Pajak

.....

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BKPD

Tata Cara penghitungan dan penetapan :

Self Assesment

Diterima tanggal :

Petugas Penerima :

NIP :



Nomor SPTPD :

TANDA TERIMA

Nama :

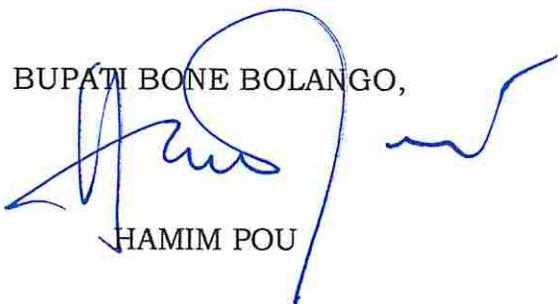
Alamat :

....., 2017

Yang menerima

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2017

Suwawa, Juli 2017

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
PENGELOLA : DINAS KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango
Dari : Plt. Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juli 2017
Nomor : 900/BKPD-BB/617/VII/2017
Perihal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati terkait Pelaksanaan Pajak Daerah :
1. Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
2. Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- II. Pertimbangan : 1. Bahwa telah diundangkannya Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri.
2. Bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan – perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, diantaranya terkait Wajib Pungut dan Wajib Setor dalam Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Mineral BLB.
3. Bahwa Penerbitan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati terkait Pelaksanaan Pajak Daerah : Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango

W. H. An. B. B. P. D.

28/07/17

[Signature]

III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui permohonan Penerbitan Peraturan Bupati terkait Pelaksanaan Pajak Daerah : Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bone Bolango

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kep. Kepala Badan, 4

JUSNI BOLILIO, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19630702 198602 1 003